

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN PSIKOSOSIAL BAGI PENYINTAS BENCANA TSUNAMI SELAT SUNDA DI KABUPATEN PANDEGLANG

R. M Fauzan Peridely
NPP 30.0628

Asdaf Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email: fauzan.dely@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Kusworo, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background(GAP): In 2018, the tsunami disaster hit the Sunda Strait region, one of which received the greatest impact in the Pandeglang Regency area. The disaster is a loss for people's lives such as environmental damage, facilities and infrastructure resulting in casualties, loss of property, unstable social life of the community, and psychological effects.

Purpose: This study intends to determine the implementation of psychosocial service policies for victims of the Sunda Strait tsunami disaster in Pandeglang Regency, the inhibiting factors in policy implementation, and the efforts made in implementing psychosocial services due to the tsunami disaster in Pandeglang Regency.

Method: Researchers use the theory of Van Meter and Van Horn to see the implementation of policies. The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques used in this study were interviews and documentation. Researchers use the Miles and Huberman model as a data analysis technique consisting of data collection, data reduction, data presentation, and data verification.

Result: Research results Implementation of psychosocial service policies; in Pandeglang Regency is still inadequate because there is no regulation in the form of a Regional Regulation that serves as a guideline for implementing psychosocial services. In overcoming these problems the researcher provides suggestions for the implementation of psychosocial services to be more directed and measurable by making regional regulations as guidelines for the implementation of psychosocial services in a systematic manner, this needs to be a top priority that must be studied considering the implementation of policies on the conditions of the Pandeglang Regency area.

Conclusion: In the implementation of psychosocial services that have not been carried out properly, it is necessary to improve the quality of performance which is being studied by the Pandeglang Regency government as a top priority for regional development.

Keywords: tsunami, policy implementation, psychosocial services

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pada tahun 2018, bencana tsunami melanda wilayah Selat Sunda yang salah satunya berdampak paling besar di wilayah Kabupaten Pandeglang. Bencana merupakan kerugian bagi kehidupan masyarakat seperti kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana yang mengakibatkan korban jiwa, kerugian harta benda, kehidupan sosial masyarakat yang tidak stabil, dan dampak psikologis. Tujuan: Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui implementasi kebijakan layanan psikososial bagi korban bencana tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang, faktor penghambat implementasi kebijakan, dan upaya yang

dilakukan dalam implementasi layanan psikososial akibat bencana tsunami di Kabupaten Pandeglang. **Metode:** Peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn untuk melihat implementasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan model Miles dan Huberman sebagai teknik analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. **Hasil:** Hasil penelitian Implementasi kebijakan layanan psikososial; di Kabupaten Pandeglang masih kurang memadai karena belum adanya peraturan berupa Peraturan Daerah yang menjadi pedoman pelaksanaan pelayanan psikososial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut peneliti memberikan saran agar penyelenggaraan layanan psikososial lebih terarah dan terukur dengan menjadikan peraturan daerah sebagai pedoman penyelenggaraan layanan psikososial secara sistematis, hal ini perlu menjadi prioritas utama yang harus dikaji mengingat pelaksanaan kebijakan terhadap kondisi wilayah Kabupaten Pandeglang. **Kesimpulan:** Dalam pelaksanaan pelayanan psikososial yang belum terlaksana dengan baik perlu dilakukan peningkatan kualitas kinerja yang sedang dikaji oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagai prioritas utama pembangunan daerah.

Kata Kunci: Tsunami, Implementasi Kebijakan, Layanan Psikososial

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayahnya mencapai 1.904.569 km² dan rawan terhadap berbagai macam bencana. Keadaan tersebut dikarenakan secara geografis, Indonesia terdapat pada kawasan *Ring of fire* (cicin api pasifik) atau Sirkum Pasifik yaitu serangkaian gunung berapi yang berjumlah 452 buah dengan panjang 40.000 km meliputi wilayah Amerika Selatan, Amerika Utara, Jepang, Filipina, Indonesia, Selandia Baru, termasuk juga Antartika. Sebab itu, Indonesia menjadi negara yang sering dilanda Bencana Alam.

Bencana alam merupakan bagian yang tidak dapat dipisah dari kehidupan manusia dan secara alami merupakan bagian dari kombinasi aktifitas alam itu sendiri. Konsekuensi dari bencana berupa kerugian bagi kehidupan masyarakat seperti kerusakan lingkungan, sarana prasarana munculnya korban jiwa, hilangnya harta benda, tidak stabilnya kehidupan sosial masyarakat, serta pengaruh psikologis. Tsunami adalah salah satu dari sekian banyak bencana yang acap kali berlangsung, sebab wilayah Indonesia banyak mendiami daerah patahan gempa ditambah banyaknya gunung berapi yang masih aktif.

Tsunami adalah salah satu dari sekian banyak bencana yang acap kali berlangsung, sebab wilayah Indonesia banyak mendiami daerah patahan gempa ditambah banyaknya gunung berapi yang masih aktif. Dilansir dari databoks.katadata.co.id, tercatat bahwa Tsunami terbesar pernah menimpa Indonesia yang berakibat banyaknya jumlah korban meninggal mencapai ratusan hingga ribuan orang.

Kabupaten Pandeglang pernah ditimpa musibah Tsunami di penghujung tahun 2018, tepatnya pada tanggal 24 Desember 2018. Tsunami didahului dengan gempa akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan longsor bawah laut. Kabupaten Pandeglang menjadi kawasan yang terkena dampak terparah tercatat 290 tewas, 1143 luka-luka, 77 hilang, 14.395 orang dievakuasi. Kondisi ini sangat mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat baik secara

fisik maupun secara psikis.(papua.antaranews.com) Bisa dibayangkan ketika terjadi suatu bencana pastinya akan memberikan rasa sedih yang yang tidak bisa dibayangkan oleh orang yang tidak merasakan seperti kehilangan orang terdekat, keluarga, sanak saudara, kehilangan harta benda, tempat tinggal, mata pencaharian, bahkan sampai kehilangan harapan untuk melanjutkan hidup.

Gejala gangguan emosional yang muncul merupakan sumber penderitaan dan dapat mempengaruhi kemampuan korban bencana untuk mengatur kembali kehidupan mereka. Tanpa tindakan cepat, para penyintas, keluarga dan masyarakat tidak akan dapat menjalani kehidupan yang layak (Retnowati, 2012).

Korban bencana membutuhkan bantuan berupa fisik maupun psikologis namun kebanyakan bantuan yang datang berupa bantuan fisik yang disalurkan oleh pemerintah maupun masyarakat Seperti membawa alat berat atau alat yang dapat membantu proses evakuasi dan proses pembersihan, pengiriman tenaga medis dan pemberian obat-obatan, bantuan pangan (sembako), sandang, bantuan perahu untuk pemulihan ekonomi nelayan, bantuan jenis ikan untuk budidaya, Pelatihan Modal dan Kewirausahaan (<http://www.tribunnews.com>).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Masalah yang berkaitan dengan Implementasi Layanan Psikososial bagi Penyintas Bencana di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Pandeglang pernah ditimpa musibah Tsunami di penghujung tahun 2018, tepatnya pada tanggal 24 Desember 2018. Tsunami didahului dengan gempa akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan longsor bawah laut. Kabupaten Pandeglang menjadi kawasan yang terkena dampak terparah tercatat 290 tewas, 1143 luka-luka, 77 hilang, 14.395 orang dievakuasi. Kondisi ini sangat mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat baik secara fisik maupun secara psikis. Bisa dibayangkan ketika terjadi suatu bencana pastinya akan memberikan rasa sedih yang yang tidak bisa dibayangkan oleh orang yang tidak merasakan seperti kehilangan orang terdekat, keluarga, sanak saudara, kehilangan harta benda, tempat tinggal, mata pencaharian, bahkan sampai kehilangan harapan untuk melanjutkan hidup. Yaitu mengenai rendahnya pemahaman baik masyarakat maupun pemerintah yakni para pemangku jabatan. Kebijakan yang ada sampai dengan saat ini dinilai masih kurang memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana secara umum belum lagi mengenai layanan psikososial di Kabupaten Pandeglang. Meninjau kondisi Geografis Kabupaten Pandeglang yang memiliki gunung serta garis pantai memungkinkan bencana alam yang sering terjadi belum lagi ancaman bencana lainnya seperti Banjir, Kebakaran, Kekeringan, Wabah Penyakit, Epidem, dan Pandemi Cuaca Ekstrim Tanah Longsor Gelombang Ekstrim Dan Abrasi. Masyarakat Kabupaten Pandeglang pastinya akan ada rasa takut dan cemas karena masyarakat tidak bisa tenang karena bencana alam datang di waktu yang tak terduga dan bencana juga tidak datang ketika dalam masyarakat keadaan siap. Salahsatu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan psikologis akibat bencana yaitu dengan memperkuat ketahanan masyarakat melalui pelatihan pemulihan kondisi psikologis.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan layanan psikososial pasca bencana. Penelitian Conny Juliana Surudani, dkk. yang berjudul “Penerapan

Adaptasi Psikososial Pada Masyarakat Pasca Trauma Bencana Alam di Kampung Kecamatan Manganitu” (Conny Juliana Surudani, dkk.,2021) menemukan bahwa penerapan adaptasi psikososial dapat mengembalikan kembali hubungan sosial satu sama lain kemudian intervensi adaptasi Psikologis pada masyarakat mengurangi rasa cemas pada keluarga yang mengalami trauma pasca bencana. Penelitian Nurin Rochayati, dkk. dengan judul penelitian “Pemulihan Psikososial Anak Dengan Metode Games dan Outbond Pada Pascagempa” memberikan metode pemulihan psikososial kepada anak pasca terjadinya gempa sebagai pembentukan jiwa pada anak agar mampu bertahan menghadapi permasalahan dan anak akan lebih kuat menghadapi segala yang menimpa dirinya dan tidak berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dilakukan melalui pendekatan permainan, tebak kata, lomba dan lainnya untuk mengembalikan keceriaan dan juga mengembalikan semangat motivasi anak-anak (Nurin Rochayati, dkk,2018) Penelitian Suryaningsih, dkk. dengan judul “Perubahan Kondisi Psikososial dan Spiritual Pada Korban PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) Pasca Banjir Bandang Di Kota Garut Jawa Barat” mendapati bahwa aspek psikososial yang dialami oleh keluarga sebgiaan besar bersifat negatif dengan aspek spiritual bersikap rendah dengan dibutuhkannya keterlibatan berbagai pihak dalam memberikan Psikososial Support Program sebagai solusi pemulihan aspek psikososial dan spiritual pada masyarakat pasca bencana (Suryaningsih, dkk.,2019). Selain itu, menurut Wardiyah Daulay dkk. yang berjudul “Jurnal Perkembangan Psikososial Anak dan Remaja Pasca Erupsi Sinabung di Kabupaten Karo” menemukan Perkembangan psikososial anak di Desa Batukarang sebgiaan besar cukup dan ada beberapa anak yang memiliki perkembangan psikososial yang baik dan Perkembangan psikososial remaja di Desa Batukarang mayoritas mengalami perkembangan dan sebagian remaja masih mengalami trauma pasca erupsi gunung Sinabung (Wardiyah Daulay dkk. 2021).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dan belum pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana fokus utamanya peneliti mengaitkan dengan implementasi layanan psikososial pasca bencana dalam hal ini bencana tsunami namun dari sudut pandang pemerintah daerah yang kemudian dihubungkan dengan kebijakan yang berlaku di daerah sebagai pedoman dasar pelaksanaan layanan tersebut, selain itu metode dan teori yang digunakan berbeda dengan penelitian Conny dkk, Nurin dkk, Suryaningsih dkk, dan Wardiyah dkk. Teori yang digunakan berbeda dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (Agustino,2020) dengan menggunakan 5 indikatornya yaitu Standar ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik agen pelaksana, Sikap atau kecenderungan para pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana.

1.5 Tujuan

Tujuan yang ingin diketahui dari penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan layanan psikososial bagi penyintas bencana tsunami selat sunda di Kabupaten Pandeglang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupaya mengklarifikasi bagaimana mereka menafsirkan ide, perasaan, dan/atau lingkungan alami responden, serta bagaimana mereka menafsirkan gejala mereka (Samsu,2017). Sugiyono memperjelas metode penelitian kualitatif

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengumpulan data secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2020).

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan model Miles dan Huberman sebagai teknik analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari 1 Orang Kasi Kepala Seksi Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBDPK Kabupaten Pandeglang, 1 Orang Ketua Tim Layanan Dukungan Psikososial Banten, 1 Orang Staf bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBDPK Kabupaten Pandeglang, 1 Orang Kepala Bagian Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, 1 Orang Masyarakat korban selamat yang mengalami secara langsung kejadian Bencana Tsunami Selat Sunda, 1 Orang relawan masyarakat dari Kelompok Kerja Relawan Pandeglang, 1 Orang Ketua Tim Layanan Dukungan Psikososial Anak Provinsi Banten, dan 1 Orang Kepala Seksi Strategi dan Pengendalian Operasi BPBDPK Kabupaten Pandeglang. Analisisnya menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (Agustino,2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Layanan Psikososial Bagi Penyintas Bencana Tsunami Selat Sunda

Kinerja kebijakan penanggulangan bencana didefinisikan sebagai kinerja yang dicapai oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengantisipasi dan berupaya mengatasi suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu penghidupan masyarakat karena faktor alam atau faktor tidak alami Tingkat pencapaian atau hasil. Sebagai faktor manusia yang menimbulkan kerugian, kerusakan manusia dan lingkungan, kerusakan harta benda dan pengaruh psikologis.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan. Hal tersebut karena Pemerintah Daerah memiliki peranan yang strategis untuk melakukan pemulihan kembali terhadap kerusakan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat bencana.

Bupati Pandeglang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 360/Kep.425-Huk/2018 tanggal 23 Desember 2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 dan Surat Keputusan Nomor 460/Kep.17-Huk/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Tsunami di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019. Mengingat pemulihan bencana tsunami dinilai sangat mendesak, maka pada masa transisi ini penyelesaian dokumen perencanaan pemulihan dan rekonstruksi Tsunami Selat Sunda 2019-2020 di Kabupaten Pandeglang akan segera diselesaikan. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan selama periode tersebut. Peneliti bertujuan bagaimana upaya dan pelayanan Psikososial yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang Ketika terjadinya Bencana Tsunami selat Sunda dengan menggunakan indicator menurut Van Meter dan Van Horn (Standar ukuran kebijakan, Sumber daya, Karakteristik agen Pelaksana, Sikap Pelaksana, Komunikasi antar organisasi).

1. Standar Ukuran Kebijakan

kebijakan atau regulasi mengenai bencana memang masih adanya regulasi Layanan Psikososial yang merupakan bagian dari rehabilitasi dan rekonstruksi. Tidak hanya itu, peraturan daerah terkait penanggulangan bencana yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang Selain itu sebab belum adanya pertaturan daerah karena anggaran yang terbatas menjadi penghambat tidak hanya dalam pembuatan peraturan daerah namun juga penyelenggaran penanggulangan bencana.

tanpa adanya peraturan daerah Kabupaten Pandeglang layanan psikososial tetap diberikan kepada para korban dan penyintas bencana dengan menggunakan keputusan gubernur mengenai pembentukan klaster perlindungan dan penanggulangan bencana di Provinsi Banten sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai halnya pada Pasal 78 ayat 1 pemenuhan kebutuhan dasar meliputi penyediaan diantaranya pelayanan Psikososial.

Gambar 1.



Sumber: Keputusan Gubernur Nomor 460.05/Kep.36-Huk/2022

Keputusan Bupati Tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami selat sunda setelah ditelaah masih belum optimal karena secara substansi upaya yang dilakukan lebih menitikberatkan pada rekonstruksi daripada upaya rehabilitasi hal tersebut dikarenakan lebih melakukan pendekatan pada wilayah pemukiman yang terdampak dijadikan prioritas pemulihan dikarenakan sektor permukiman karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

2. Sumber Daya

kondisi sumber daya manusia yang ada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan karena melihat situasi dan kondisi Sumber daya manusia berikut dengan tenaga yang ada sekitar 70% masih perlu ditambahkan dan kompetensinya juga, namun walaupun demikian peningkatan kesiapsiagaan terus ditngkatkan. Dari segi peralatan sudah cukup baik karena

biasanya kiriman bantuan berupa peralatan selalu ada dan diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang.

Dalam layanan Psikososial atau hal serupa yang sejenis sumber daya manusia maupun fasilitas yang ada masih belum memadai dan sesuai dengan standar pelayanan

Sumber daya manusia pemberi bantuan layanan psikososial tidak hanya dari pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi tapi juga melibatkan NGO, swasta, serta adanya sukarelawan yang punya kepedulian dengan ikut serta memberikan bantuan kepada masyarakat namun dari berbagai macam pihak tersebut masih kurang optimal jadi masih perlu adanya penambahan sumber daya manusia. Korban dan penyintas bencana tsunami tidak hanya masyarakat lokal namun ada juga para pendatang yang sedang liburan akhir tahun.

Sumber daya manusia untuk memahami program tampaknya masih kurang karena kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah akan pentingnya pengetahuan khusus untuk memahami program selama ini masih rendah. Namun, keterbatasan sumber daya tentunya bukan menjadi alasan untuk tidak berupaya membantu sumber daya manusia yang tentunya akan digunakan semaksimal mungkin sesuai dengan aturan dan prosedur.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

karakteristik tenaga layanan psikososial sudah cukup menguasai karena pemberian layanan juga dikategorisasi karena mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disampaikan dengan begitu pemberian layanan akan lebih tepat sasaran karena sesuai dengan porsi penerimanya. Kemudian pemberian bantuan juga sampai ke tingkatan yang lebih privasi dengan membuat bilik asmara demi terpenuhinya kebutuhan biologis pasangan suami istri yang tertahan akibat dampak tsunami. Kemudian dalam rangka meningkatkan serta mengembangkan layanan dalam beberapa waktu ke depan dan yang akan datang maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang yang kemudian menjadi pembuka bagi aspek-aspek yang berkaitan dengan terjadinya bencana.

upaya penanganan bahaya bencana yang mengancam sudah dibangun sekitar 13 kampung siaga bencana dari total 35 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang yang di dalamnya memuat lumbung sosial juga tenaga yang berada di kampung siaga bencana secara aktif turut mensosialisasikan kepada masyarakat dan ke sekolah-sekolah mengenai bencana di daerahnya dan bagaimana cara terhindar darinya. Sampai dengan saat ini sudah terlihat pengembangan dan usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan.

kronologi kejadian secara apa yang dialaminya dan beliau juga mengalami perasaan takut dan trauma yang cukup mendalam dari bencana tersebut meskipun baik dari tenaga bantuan pemerintah sudah memberikan pertolongan dan upaya namun apa yang diberikan tersebut masih belum cukup dan berdampak bagi kondisinya, dan trauma tersebut sangat memengaruhinya tatkala ada pemicu yang mengingatkannya pada kejadian hari itu. Agen pelaksana di sini masih perlu memberikan perhatian tidak hanya pasca bencana dan berhenti disana namun upaya dalam jangka Panjang karena akan mempengaruhi keadaan kehidupan masyarakat yang terdampak kedepannya.

4. Sikap Para Pelaksana

para pelaksana memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan diantaranya juga bekerjasama dengan ditpolair Polres Pandeglang dengan membangun posko yang dengan maksud mempermudah pemberian bantuan dan kemudahan akses. Kemudian bantuan juga disampaikan dari Lembaga-lembaga meskipun demikian tetap tidak hanya bantuan berupa

logistic namun juga upaya pemulihan ekonomi dan memperhatikan kondisi psikis masyarakat terutama anak-anak yang masih kadangkala ketakutan.

Sikap dari agen pelaksana tidak hanya melakukan hal yang karena suatu tuntutan melainkan timbul atas kesadaran menolong orang-orang yang sekiranya membutuhkan bantuan. Dalam hal ini para pelaksana sudah memberikan dorongan kepedulian sehingga banyak pribadi yang bergerak merasa terpanggil akibat dampak yang sangat besar dari peristiwa yang terjadi.

pelaksana menggunakan metode Body Mapping merupakan metode bermain dan belajar yang disesuaikan dengan kelompok umur anak mengungkapkan perasaan yang sedang dialami kemudian mereka harapannya bisa mengatasi perasaan yang dirasakan oleh anak-anak tersebut.

5. Komunikasi Antar Organisasi

diketahui koordinasi merupakan kunci mencapai suatu tujuan dan tidak bisa dilakukan secara sendiri perlu adanya bantuan dari antarn instansi pemerintahan maupun peran NGO untuk menghindari kemungkinan tidak tercapainya sasaran program maupun layanan. Rapat koordinasi juga selalu dilakukan mengenai standar playanan minimum dalam penanggulangan bencana di wilayah Banten.

koordinasi sebetulnya telah terjalin namun masih ada kendala dalam pemeberian layanan yang menjadi catatan kurangnya persiapan peristiwa tsunami memang mendesak seluruh aspek pemerintahan untuk menindak lanjuti dengan memberikan bantuan kepada masyarakat lokal maupun luar daerah. Kemudian juga memberikan bantuan perlu dilakukan secara berkala karena mengatasi permasalahan kondisi masyarakat perlu dilakukan secara intensif, metode yang berbeda-beda dari masing-masing individu, dan juga jumlah yang sangat tidak bisa diperkirakan karena berpotensi bertambah.

3.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan layanan Psikososial

1. Kurangnya wawasan stakeholder terhadap penanggulangan bencana

Dalam penetapan Peraturan Daerah tidak bisa dipungkiri bahwa ada peran stakeholder yang memutuskan bahwa sebuah peraturan itu harus ada atau tidak karena mereka memiliki kuasa atas suatu peraturan yang kemudian diselenggarakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak terkecuali di Kabupaten Pandeglang bahwa para stakeholder memerlukan edukasi dan pemahaman bahwa Kabupaten Pandeglang merupakan zona merah dengan indeks risiko bencana yang terbilang tinggi dan seharusnya peraturan Daerah tentang penanggulangan bencana menjadi prioritas karena masih kurangnya wawasan terhadap penanggulangan bencana.

2. Sumber daya Yang masih kurang dan berkompeten

Sumber daya yang berada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang masih kurang dari segi jumlah dan kemampuan meskipun Ketika terjadi bencana mereka selalu siap sedia namun hal tersebut masih kurang dan perlu adanya pengembangan kompetensi dari sumber daya manusia. Masih rendahnya kedadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat masih dirasakan kurang. Sehingga perlu pembaharuan sumber daya Manusia.

Selain itu, perlu adanya peningkatan fasilitas dan perlaatan yang mendukung dan jangan sampai hanya terus-menerus mengandalkan bantuan dari pihak-pihak tertentu perlu adanya pengadaan yang dipersiapkan secara matang sebagai bentuk persiapan menghadapi situasi yang tak terduga.

3. Terbatasnya Anggaran

Anggaran adalah hal yang paling mendasar dan mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah sebab belum rampungnya peraturan Daerah yaitu anggaran. Penyediaan infrastruktur pendukung penanggulangan bencana mengakibatkan keterbatasan anggaran, sehingga saat ini lebih ditekankan pada pendekatan sosial seperti penyadaran dan penguatan kelompok Relawan bencana di desa-desa. Selain upaya penguatan di sisi sektor kelompok relawan maupun tenaga fungsional yang siap sedia, namun karena tidak adanya anggaran maka pelaksanaan menjadi terhambat bahkan sampai tidak terlaksana.

Gambar 2.



Sumber: Rencana Strategi BPBDPK Kabupaten Pandeglang 2021-2026

Berdasarkan gambar di atas merupakan skema pendanaan dalam hal ini dalam rangka penanggulangan bencana, anggaran bersumber dari APBN di lingkup pemerintah pusat dan berasal dari APBD di lingkup Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

3.3 Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran menindaklanjuti bencana tsunami selat sunda dengan membuat Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021-2026 untuk memperjelas arah dan tujuan harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam RPJMD 2021-2026, peraturan daerah mengenai penanggulangan bencana masih belum ada hal tersebut merupakan terjadinya hambatan dan tidak maksimalnya BPBDPK dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi. Kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Pandeglang menjadi dasar pilihan tindakan yang dapat diambil oleh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di Kabupaten Pandeglang.

Kemudian diterbitkannya Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Pandeglang. Merupakan pedoman penanggulangan bencana bagi seluruh perangkat pedoman penanggulangan bencana bagi seluruh perangkat daerah, Lembaga vertikal daerah, organisasi non pemerintah, warga masyarakat dan pihak lain yang dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Pandeglang.

Berhubungan dengan layanan psikososial pasca bencana tsunami selat sunda yang telah dilasanakan, adanya Peraturan Bupati mengenai Rancangan Kedaruratan Penanggulangan Bencana ini akan mengoptimalkan pelaksanaan bantuan karena di dalam juga turut

mencantumkan Dukungan Psikososial menggunakan Teknik Psychological First Aid bagi korban maupun penyintas bencana.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi layanan psikososial bagi penyintas bencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang tetap berjalan meskipun kebijakan sebagai pedoman dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana masih belum cukup optimal. Berbeda dengan temuan penelitian terdahulu, penelitian ini berlandaskan kebijakan yang berlaku di Kabupaten Pandeglang sebagai pedoman yang memuat teknis dalam melaksanakan program yang kemudian ditaati dan dilaksanakan oleh pelaksana yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan temuan terdahulu tidak melibatkan kebijakan dari pemerintah bagian penting yang perlu diperhatikan namun langsung melaksanakan sesuai teknis yang memang sudah direncanakan. Secara teknis pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik karena sudah memahami bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai sasaran dengan kategori kelompok umur, serta prioritas. Hal tersebut tidak terlepas komunikasi yang baik, bantuan sumber daya dan tenaga pelaksana dari eksternal seperti NGO, Relawan, instansi di luar BPBD yang memberikan kontribusi secara nyata. Selain itu dibangun juga posko-posko yang berperan sentral sebagai dapur umum maupun tempat pengungsian sementara bagi masyarakat terdampak.

Namun peneliti menyadari bahwa ada hambatan yang membuat realisasi layanan psikososial ini tidak berjalan dengan baik, diantaranya yaitu standar kebijakan yang dimiliki Kabupaten Pandeglang masih belum memuat perihal kebencanaan secara eksklusif, berkaitan dengan hal tersebut didapati bahwa faktor yang menjadi penyebabnya yaitu anggaran yang terbatas sehingga kebijakan mengenai penanggulangan bencana masih belum rampung sampai dengan saat ini. Pemahaman para pemangku kebijakan yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan juga dinilai kurang paham karena seharusnya melihat kondisi Kabupaten Pandeglang yang demikian berpotensi dilanda berbagai macam bencana maka seharusnya dijadikan prioritas utama yang kemudian dikaji lebih dalam. Kemudian sumber daya yang kurang berkompeten ditambah kuantitasnya yang masih kurang. Fasilitas yang ada masih kurang memadai untuk mendukung tercapainya sasaran program penanggulangan bencana,

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang kemudian peneliti sajikan sebelumnya maka peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan belum terlaksananya layanan psikososial dengan baik karena aspek regulasi yang mengatur penyelenggaraan bencana di Kabupaten Pandeglang belum kuat secara substansif hal tersebut berkaitan dengan para stakeholder yang masih belum paham dengan penanganan bencana sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Selain itu masih ada beberapa kendala lain seperti sumber daya yang kurang berkompeten, sarana prasarana yang masih kurang memadai, komunikasi yang sebetulnya sudah berjalan dengan baik antar instansi namun masih perlu ditingkatkan, sikap dan karakteristik agen pelaksana masih perlu dimaksimalkan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana secara menyeluruh.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian hanya dilakukan kurang lebih dua minggu sehingga waktunya tidak cukup untuk menggali informasi dari para informan di Kabupaten Pandeglang.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyadari masih terbatasnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan perlu dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Layanan Psikososial Bagi Penyintas Bencana di Kabupaten Pandeglang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang secara khusus kepada Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada peneliti melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu penelitian ini dapat terselesaikan dan terlaksana dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2)*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kab Pandeglang. (2021). *Rencana Strategi BPBDPK Kabupaten Pandeglang 2021-2026*.
- Badan Pusat Statistik Kab. Pandeglang. (2022). *Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2022*.
- Daulay, W., Nasution, M. N., & Wahyuni, S. E. (2021). *Perkembangan Psikososial Anak dan Remaja Pasca Erupsi Sinabung di Kabupaten Karo*, Jurnal Mutiara Ners Vol. 4 No. 2.
- Kurniawan, K. (2020). *Apa Itu Tsunami? Pengertian Tsunami Menurut WMO*. <https://maritim.kalbar.bmkg.go.id/konten/tsunami/#:~:text=Tsunami%20adalah%20gelombang%20atau%20serangkaian,gunung%20berapi%2C%20atau%20dampak%20asteroid>
- Purnamawati, D. (2018). *BNPB: korban jiwa akibat tsunami Selat Sunda capai 429 orang*. <https://papua.antaranews.com/berita/474828/bnpb-korban-jiwa-akibat-tsunami-selat-sunda-capai-429-orang>
- Retnowati, S. (2012). *Intervensi Psikososial Saat bencana dalam Prawitasari, JE. Psikologi Terapan: Melintas Batas Disiplin Ilmu*. Jakarta: Erlangga.
- Rochayati, N., Pramunarti, A., dkk. (2018). *Pemulihan Psikososial Anak Dengan Metode Games dan Outbond Pada Pascagempa*. Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol. 2 No. 1.
- Surudani, C. J., Makahaghi, Y. B., & Delia, N. (2021). *Penerapan Adaptasi Psikososial Pada Masyarakat Pasca Trauma Bencana Alam di Kampung Kecamatan Manganitu*. Pagandaheng: Jurnal Ilmiah Tatengkorang Vol. 5 No. 1, 2021.
- Suryaningsih, Muhafiah, I., & Herawati, T. H. (2019). *Perubahan Kondisi Psikososial dan Spiritual Pada Korban PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) Pasca Banjir Bandang Di Kota Garut Jawa Barat*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Vol. 11 No. 1.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

